

Daftar Pustaka

Buku

- Belakang, A. L. (1945). *Tedi Sudrajat. Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, Hukum Kepegawaian Di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). 1 1. 1–19.*
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, cet. VIII, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: UI Press, 2001.
- Subagyo, Mulyadi. *Meritokrasi dalam Pengelolaan ASN: Studi Kasus di Kementerian Keuangan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.
- . *Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Pegawai Non-ASN*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Zamzami, A. (2020). Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. *Yurispruden*, 3(2), 200. <https://doi.org/10.33474/yur.v3i2.6736>

Artikel Jurnal

- Akhmaddhian, S. (2018). Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governace. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, 09(1), 30–38.
- Akny, A. B. (2014). Mewujudkan Good Governance melalui Reformasi Birokrasi di bidang SDM Aparatur untuk Peningkatan Kesejahteraan Pegawai. *Jejaring Administrasi Publik*, 4(1), 416–427.
- Alfaini, Zulfa Nada, dan Achmad Khudori Soleh. “Objek ‘Akal Bagi Kehidupan Manusia: Prespektif Al-Qur’An.” *Fathir: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2025): 54.
- Asrul, A. (2022). Fungsi Hukum Administrasi Negara Bagi Pemerintahan. *Juripol*, 5(2), 464–470. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11784>
- Astuti, Duwi, dan Aris Toening Winarni. “Diskresi Perekrutan PPNPN (PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI) Berdasarkan Surat Menteri PANRB NO. B/185/M.SM.02.03/2022 Tentang Status Kepegawaian Di Instansi Pemerintah Pusat Serta Pemerintah Daerah.” *JMA: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI* 20, no. 2 (2023): 151–152.
- Briandi, Liju, Fernando J.M.M. Karisoh, dan Youla O. Aguw. “Hubungan Kerja Antara Pemberi Kerja.” *Lex Administratum* IX, no. 2 (2021): 263.
- Chakti, Muh. Chikal C., Baso Mading, dan Yulia A. Hasan. “Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Makassar.” *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 2 (2024): 325.
- Dan, I., & Negara, K. (2023). Hukum administrasi negara dalam menegakkan integritas dan keadilan negara 1. *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan*, 259–264.

- Desfi, Cory Monica, dkk. “Upaya Perwujudan Hak Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.” *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 1 (2023): 148.
- Hadian, Anhar, Deddy Mulyadi, dan Nita Nurliawati. “Strategi Transformasi Tata Kelola Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) Di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Bandung.” *Jurnal Media Administrasi Terapan* 3, no. 2 (2023): 125.
- Hasibuan, S. (2021). Manajemen Sumber Daya Manusia : pendekatan non sekuler,. *Muhammadiyah University Press*, c.
- Hastuti, Sri. “Pentingnya Digitalisasi dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia.” *Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 3 (2022): 35–37.
- Ibad, S. (2021). Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), 55–72. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72>
- Ikhsana, Khusnul. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Honorer Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.” *Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 65.
- Kennedy, A., Surya, W. H., Mustika, S. R., Xaverius, F., & Pemerintah, P. (2024). *ISSN ONLINE : 2745-8369 Sumber-Sumber Hukum Governance di Indonesia Administrasi Negara dalam Kerangka Good*. 5(September), 558–569.
- Khair, Otti Ilham. “Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia.” *Widya Pranata Hukum* 3, no. 2 (2021): 46.
- Nebuchadnezzar, Bintang Aspanu, Ray Farhad Wibisono, dan Muhammad Sheehan Javieri Setiawan. “Pemenuhan Hak Hukum Kepegawaian Bagi Non PNS Yang Bekerja Di Instansi Pemerintahan Daerah.” *Yustisi: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 3 (2024): 42–43.

- Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). 濟無No Title No Title No Title. *Journal GEEJ*, 7(2), 135–145.
- Putrijanti, A., Leonard, L. T., & Utama, K. W. (2018). Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 277. <https://doi.org/10.22146/jmh.33056>
- Rohmattulloh, Rudi, dan Galuh Pancawati. “Analisis Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Di Badan Nasional Penanggulangan Bencana.” *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 8.0 3*, no. 1 (2024): 488.
- Sakir, Ahmad Rosandi. “Transformasi Birokrasi Di Indonesia: Kajian Dari Sudut Pandang Administrasi Publik.” *Gema Publica: Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik* 9, no. 2 (2024): 134.
- Soritus, Jonathan Elkana. “Perlindungan Data Pribadi Ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi.” *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 1 (2024): 5.
- Sumanti, Naftali Yesaya Gabriel, Donna Okthalia Setiabudhi, dan Marthin Luther Lambonan. “Perlindungan Hukum Terhadap Guru Honorer Setelah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.” *Artikel Skripsi Unsrat* 1, no. 2 (2022): 3.
- Susanto, S. N. H. (2019). Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 205–217. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.205-217>
- Tobroni, F. (2020). Tinjauan HAM dalam Regulasi PPPK dengan Intertekstualitas Teks Hukum. *Jurnal HAM*, 11(2), 219. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.219-238>

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2020.

———. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara*.

Laporan dan Sumber Resmi

Badan Kepegawaian Negara. *Laporan Kepegawaian Nasional Tahun 2024*. Jakarta: BKN, 2024.

———. *Sistem Manajemen ASN di Indonesia*. Jakarta: BKN, 2020.

———. *Manajemen Kepegawaian Non-ASN di Indonesia*. Jakarta: BKN, 2020.

Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Tegal. *Laporan Kepegawaian Tahun 2024*. Tegal: BKPPD Kota Tegal, 2024.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. *Kebijakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri*. Jakarta: KemenPAN-RB, 2021.

———. *Laporan Evaluasi Pegawai Honorer dan Non-ASN Tahun 2023*. Jakarta: KemenPAN-RB, 2023.

———. *Reformasi Birokrasi dan Tantangan ASN Masa Depan*. Jakarta: KemenPAN-RB, 2019.

Sumber Online

Harahap, A. F. (2020). Penerapan Perluasan Keputusan Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Dalam Penegakan Hukum Administrasi dan Kaitannya Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance (Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 87 UNDANG-UNDANG No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). *Binamulia Hukum*, 9(2), 171–182.

<https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.126>

Haris, O. K. (2017). Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah Di Bidang Pertambangan. *Yuridika*, 30(1), 58. <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i1.4879>

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo. “Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya.” JDIH Sukoharjo. Terakhir diakses 5 Maret 2025, pukul 03.37 WIB. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>.

Panjaitan, S. P. (1991). Makna dan Peranan Freies Ermessen dalam Hukum Administrasi Negara. *Unisia*, 11(10), 53–60. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol11.iss10.art4>

Lampiran